

PENGARUH KESADARAN KELENGKAPAN KEPEMILIKAN SURAT TANDA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ASPEK TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA DI KELURAHAN RUMBIH

Cici Indrawati, Berchah Pitoewas, Muhammad Mona Adha

Fakultas Keguruann dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Email: indrawaticici34@gmail.com, berchahpitoewas@gmail.com,

mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id

Abstract

The influence of awareness of ownership of motorized vehicle certificates is important for the community as a form of citizen responsibility in terms of obeying state rules. Therefore, this study was conducted with the aim of knowing the effect of awareness of the completeness of ownership of motorized vehicle registration certificates in the rumbih village. The research method used is a quantitative approach with descriptive methods, then data collection techniques in the field are carried out by means of observation and questionnaires. . Responsibility to the community which includes the rules, norms that apply in the community. Then the responsibility for religion which includes God related to religion and beliefs. With regard to a sense of responsibility, humans should base the assumptions of each individual by acknowledging the fact that humans in narrow and broad relationships need each other to realize the values of life that are felt to be good and support the existence of each individual. Based on the results and discussion, a regression model has been obtained with an r-square of 7.8% which has fulfilled all the classical assumptions in linear regression. In addition, based on the hypothesis test that has been carried out, it can be concluded that the completeness of ownership of a motorized vehicle registration certificate significantly affects aspects of citizen responsibility. Based on the sign of the regression, it indicates that ownership of a motorized vehicle registration certificate has a positive effect on aspects of citizen responsibility.

Keywords: *Public Awareness, Citizens, Responsibilities*

Abstrak

Pengaruh kesadaran kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor menjadi hal yang penting bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam hal taat terhadap aturan negara. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor di kelurahan rumbih. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi, dan angket. . Tanggung jawab kepada masyarakat yang meliputi aturan, norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap agama yang meliputi Tuhan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, hendaknya manusia melandasi anggaapan disetiap individu dengan mengakui kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasa baik dan menunjang eksistensi diri disetiap individu. Berdasarkan hasil dan pembahasan, telah didapatkan model regresi dengan nilai rsquare sebesar 7,8% yang telah memenuhi seluruh asumsi klasik dalam regresi linier. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor signifikan mempengaruhi aspek tanggung jawab warga negara. Berdasarkan tanda dari regresi menandakan bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap aspek tanggung jawab warga negara.

Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Tanggung Jawab Warga Negara

A. Pendahuluan

Kendaraan bermotor merupakan transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi umum utama dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia sebagai negara hukum yang berarti juga menunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, turut melaksanakan amanah dari Undang- Undang Dasar 1945 dalam melaksanakan tindakan berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah aturan dalam penggunaan berkendara sepeda motor yang juga turut diatur dalam perundang-undangan demi mencapai ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Penilaian terhadap sikap warga negara yang baik juga dapat dinilai dari aspek kepatuhan terhadap hukum, termasuk aturan hukum dalam berkendara. Kepatuhan ini dinilai dari rasa takut untuk melanggar peraturan berlalu-lintas seperti tidak memiliki identitas kendaraan bermotor yang lengkap, tidak menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan saat berlalu lintas, serta tidak adanya pengetahuan warga negara terhadap sanksi- sanksi yang diterima apabila melanggar peraturan hukum yang berlaku. Aturan- aturan berlalu lintas ini diatur seperti dalam bagian ke empat paragraf 1 tentang ketertiban dan keselamatan Undang- Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan ada peraturan undang-undang itu diharapkan pengendara bermotor dapat menaati dengan tujuan untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang aman dan tertib. Selain itu terdapat aturan yang mengharuskan pengendara untuk melengkapi identitas kendaraan dan perizinin ketika mengemudi. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (5) disebutkan bahwa: "Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor merupakan suatu aturan penting yang harus dipatuhi oleh setiap pengendara. Hal ini juga bukan hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban bherlalu lintas, namun juga untuk mengetahui tindak kejahatan seperti penggunaan kendaran bermotor tanpa surat kendaraan yang berasal dari barang curian. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji kesadaran pengendara terhadap kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor di Kelurahan Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, ISSN: 2540 - 8038

Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang merupakan salah aspek tanggung jawab warga negara dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Berdasarkan data dari arsip Kelurahan Rumbih diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam kelengkapan Surat Tanda Kendaraan Bermotor di tingkat sedang, tanggung jawab masyarakat untuk melengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor di tingkat rendah, dan pengetahuan masyarakat untuk melengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor di tingkat Sedang. Data ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum mencapai kepatuhan yang diharapkan, hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji pengaruh kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor terhadap aspek tanggung jawab warga negara di Kelurahan Rumbih.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah pengendara kendaraan bermotor di Kelurahan Rumbih dengan pengumpulan data data dari 93 responden atau 10% dari jumlah populasi. Populasi dalam penelitian ini yakni masyarakat Kelurahan Rumbih yang sudah memenuhi syarat mengemudikan kendaraan bermotor.

Variabel yang diteliti adalah kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda

kendaraan bermotor sebagai variabel bebas dan tanggung jawab warga negara sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan datanya yakni dengan teknik angket, angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan model skala likert dalam bentuk ceklis dan teknik penunjang lainnya yakni wawancara. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis presentasae, dan uji yang dilakukan yakni dengan uji prasyarat linier sederhana meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji regresi linier sederhana.

C. Pembahasan dan Hasil

Penelitian ini bertujuan un mengukur seberapa besar kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor sebagai aspek tanggung jawab warga negara di Kelurahan Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Pengujian kuesioner ini diambil dari data yang merupakan hasil dari penyebaran kuesioner yang di sebarakan kepada 93 responden dengan 68 responden laki-laki dan 25 responden perempuan. Terdapat 21 pernyataan yang terdiri dari 2 indikator dengan total 9 pernyataan variabel kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dan 3 indikator dengan total 12 pernyataan variabel aspek tanggung jawab warga negara. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya dapat memilih

salah satu alternatif jawaban. Terdapat dua indikator dalam variabel kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (X) yaitu pemahaman akan pentingnya kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dan melengkapi kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor pribadi. Terdapat tiga indikator dalam variabel aspek tanggung jawab warga negara (Y), yaitu kesadaran akan hukum yang berlaku, kecintaan dalam melaksanakan kewajiban dan keberanian untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya dapat memilih salah satu alternatif jawaban. Terdapat dua indikator dalam variabel kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor (X) yaitu pemahaman akan pentingnya kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor dan melengkapi kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor pribadi. Terdapat tiga indikator dalam variabel aspek tanggung jawab warga negara (Y), yaitu kesadaran akan hukum yang berlaku, kecintaan dalam melaksanakan kewajiban dan keberanian untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan data yang didapat dari penyebaran angket dengan 5 pertanyaan mengenai indikator pemahaman akan

pentingnya kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor, diketahui bahwa sebanyak 0% responden kurang memahami, 21,51% responden cukup memahami, dan 78,49% responden sangat memahami. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa mayoritas pengendara di Kelurahan Rumbih sangat memahami pentingnya surat tanda kendaraan bermotor. Sedangkan pada indikator kelengkapan surat tanda kendaraan bermotor pribadi diketahui bahwa 1,08% kurang lengkap, 23,66% cukup lengkap, dan 75,27% sangat lengkap. Berdasarkan data yang dikumpulkan di ketahui bahwa mayoritas pengendara di Kelurahan Rumbih memiliki kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor yang sangat lengkap

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Rumbih sudah memiliki surat tanda kendaraan bermotor yang lengkap. Surat-surat tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) C dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat di Kampung Rumbih sudah patuh terhadap hukum dalam kelengkapan surat berkendara. Namun, meskipun demikian masih hampir terdapat 30% masyarakat yang belum melengkapi surat tanda kendaraan bermotornya. Maka dari itu masih diperlukan peningkatan warga yang

melakukan kelengkapan, ada beberapa cara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi surat tanda kendaraan bermotornya. Salah satunya adalah sosialisasi lewat humas (hubungan masyarakat) kepolisian. Scott M Cutlip (2009) menyatakan bahwa, Public Relations (Hubungan Masyarakat) adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik.

Berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan mengenai indikator kesadaran akan hukum yang berlaku diketahui bahwa 0% responden kurang bertanggung jawab dengan hukum yang berlaku, 20,43% responden cukup bertanggung jawab dengan hukum yang berlaku, 79,57% responden sangat bertanggung jawab dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengendara di Kelurahan Rumbih sangat bertanggung jawab terhadap dengan hukum yang berlaku menurut persepsi responden.

Berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan dengan 5 pernyataan mengenai indikator kecintaan dalam melaksanakan kewajiban. diketahui bahwa 0 % responden kurang bertanggung jawab dalam kecintaan

melaksanakan kewajiban, 7,53% responden cukup bertanggung jawab dalam kecintaan melaksanakan kewajiban, dan 92,47% responden sangat bertanggung jawab dalam kecintaan melaksanakan kewajiban. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengendara di Kelurahan Rumbih memiliki rasa kecintaan dalam melakukan kewajiban dalam mematuhi aturan berkendara.

Berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan dengan 3 pernyataan mengenai indikator keberanian untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran, diketahui bahwa 0% responden kurang bertanggung jawab dalam keberanian menegur orang lain, 19,35% responden cukup bertanggung jawab dalam keberanian menegur orang lain, dan 80,65% responden sangat bertanggung jawab dalam keberanian menegur orang lain. Berdasarkan Data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengendara di Kelurahan Rumbih memiliki keberanian untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran.

Hasil kuesioner diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Rumbih sudah memiliki tanggung jawab yang baik sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk

memikul resiko dan suatu perbuatan yang dilakukan (Burhanudin, 2000).

Berdasarkan hasil deskripsi data, jumlah sampel responden sebanyak 93 orang yang terdiri dari 68 responden laki-laki dan 25 responden perempuan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, data analisis regresi linier sederhana mempunyai nilai probabilitas signifikan $0,006 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa H1 diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap aspek tanggung jawab warga negara di Kampung Rumbih. Sementara itu, nilai koefisien determinasi yaitu R Square = 0,078 yang mengandung makna bahwa hanya 7,8% variasi variabel aspek tanggung jawab warga negara dapat dijelaskan oleh kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor variabel dan 92,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dharma (2014) dimana kesadaran berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar pajak yang ada di kota Denpasar. Juliantari, dkk (2021) juga mengatakan bahwa semakin tinggi kesadaran seseorang, maka semakin tinggi juga orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu aspek agar masyarakat sadar dan bertanggung jawab adalah masyarakat

harus memiliki sifat *Civic responsibility*.

Gottlieb mengungkapkan *civic responsibility* merupakan suatu partisipasi aktif dengan pengertian sebagai berikut: *Civic Responsibility means aktive participation in the public life of community in a informed, commited, and conructive manner, with a focus on the common good* (Gottlieb and Robinson, 113 2002 :19). Sedangkan dalam mewujudkan sikap tanggung jawab dibutuhkan karakter yang baik melalui pendidikan karakter.

Muhammad Mona Adha (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter pada peserta didik agar dapat terwujud dalam perilaku sehari-hari. Maka dari itu penanaman sikap tanggung jawab sebagai warga negara dapat dilakukan dari lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter, lebih lanjut secara mendalam dapat diajarkan juga melalui pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Endang Ikhtiarti, dkk (2019) *civic responsibility* dapat dicapai dengan pendidikan kewarganegaraan yang baik, karena dalam pendidikan PPKn dimensi materi yang aka diajarkan meliputi pengetahuan keewarganegaraan (*civic knowledge*) yang

mencakup bidang politik, hukum, dan moral, selanjutnya adalah dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yang mencakup keterampilan, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir adalah dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) yang mencakup kepercayaan diri, komitmen, penguasaan atas nilai religious, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul serta perlindungan terhadap minoritas. Maka dari itu ketika warga Negara dapat menyerap pendidikan kewarganegaraan dengan baik maka disitulah terdapat kesadaran warga Negara untuk melaksanakan tanggung jawab dan memiliki kesadaran termasuk tanggung jawab dan kesadaran akan hukum. Selain melalui pendidikan kewarganegaraan, tanggungjawab juga dapat ditumbuhkan dari nilai-nilai yang ditumbuhkan dalam keluarga. Dwi Wahyu Saputro, dkk (2013) menjelaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab pada anak. Selanjutnya dijelaskan bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran

manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab juga dapat diajarkan mulai dari lingkup terkecil dan dapat ditanamkan sedari dini untuk menjadikan seseorang yang memiliki karakter *civic responsibility*.

Warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*) akan berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 45). Aturan-aturan tersebut dapat berupa hukum yang berlaku. Selanjutnya Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum (Apeldoorn, 1954). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Menurut Scholten (1954), Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Soerjono Soekanto (1983) memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan

penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum. Pada akhirnya sikap *Civic Responsibility* adalah untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi warga yang memiliki etika dalam kehidupan berbangsa. Muhammad Mona Adha (2020) menjelaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa serorang warga negara harus mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa, hal ini lah yang tercermin dalam pokok-pokok dalam kehidupan berbangsa. Pada pembahasan penelitian ini kesadaran dalam melengkapi kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor menunjukkan implementasi warga Negara dalam melakukan tanggung jawabnya, responden yang telah mengimplementasikan hal tersebut dapat dikatakan telah melaksanakan salah satu dari pokok-pokok dalam kehidupan berbangsa. Jika hal ini terus dilakukan dan semakin banyak warga Negara yang melakukannya maka akan tercipta *good citizenship* pada masyarakat Indonesia.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, telah didapatkan model regresi dengan nilai r^2 sebesar 7,8% yang telah memenuhi seluruh asumsi klasik dalam regresi linier. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor signifikan mempengaruhi aspek tanggung jawab warga negara. Berdasarkan tanda dari regresi menandakan bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap aspek tanggung jawab warga negara. Kesadaran masyarakat berkaitan dengan kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor perlu diperhatikan untuk menerapkan sikap teladan dan taat terhadap aturan dan norma-norma yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara guna menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
JCutlip Scott M., et al. (2007). *Effective Public Relations* (terjemahan TriWibowo). Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin, (2000) S., H. ‘Etika Individual:’. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharma, G. P. E. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB Dan BBNKB*. E-Jurnal Akuntansi, 8(2), 340-353.
- Nurmalina., Komala & Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab PKn
- Apeldoorn, Van, Pengantar. (1954). *Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid. Sadino), Jakarta
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1).
- Gottlieb, K., & Robinson, G. (2002). Civic responsibility and service learning: The need for curricular integration. *The Journal for Civic Commitment*, 2(4), 23-35.
- Adha, M. M. (2020). *Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari*. Media Komunikasi FPIPS, 10(2)
- Ikhtiarti, E., Adha, M. M., & Yanzi, H. (2019). *Membangun generasi muda smart and good citizenship melalui pembelajaran ppkn menghadapi tantangan revolusi industri*. FKIP Universitas Lampung.
- Saputro, D. W., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2013). Pengaruh Pendidikan Nilai Dalam Keluarga Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(1).
- Scholten, Mr. Paul, (1954) *Algemeen/Deel, NV Uitgeversmaats- chappij W.E.J. TjeenkWillink*
- Soerjono Soekanto, (1983), *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.